

## **Peran Pancasila Dalam Meningkatkan Usaha Perekonomian Rakyat Indonesia**

Gloria Ivana Sutedjo  
*Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia*  
*Email: 211526334@students.uajy.ac.id*

### **ABSTRAK**

Penulisan ini menggunakan penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penulisan ini yaitu agar nilai Pancasila dapat lebih diaktualisasi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Kehidupan perekonomian khususnya di Indonesia kini belum sepenuhnya didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Situasi yang tengah dihadapi masyarakat seperti pandemi covid-19 juga dapat membawa dampak bagi perubahan sistem perekonomian di Indonesia. Ketidakmerataan ekonomi dalam kehidupan rakyat Indonesia menjadi salah satu isu penting yang harus dibenahi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, rasio ketimpangan menunjukkan peningkatan dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 0.381 dan September 2019 yang sebesar 0.380. Maka dari itu, pandemi Covid-19 mengakibatkan kesenjangan penduduk antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Dalam menghadapi situasi ekonomi baik sekarang maupun dimasa depan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi solusi penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya usaha perekonomian rakyat agar tujuan kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia dapat teroptimalisasi dengan baik.

**Kata Kunci** : Pancasila, Perekonomian Indonesia, Ketidakmerataan ekonomi.

### **ABSTRACT**

This journal uses research with qualitative and quantitative data analysis methods. By writing this journal, I hope that the values of Pancasila can be more actualized in improving the Indonesian economy. Economic life, especially in Indonesia, is not yet fully based on the values of Pancasila. The situation that is being faced by Indonesians, such as globalization and the COVID-19 pandemic, can also have an impact on changes in the economic system in Indonesia. Economic inequality in the lives of the Indonesian people is one of the important issues that must be addressed. Based on the Central Bureau of Statistics, the inequality ratio showed an increase compared to March 2020 which was 0.381 and September 2019 which was 0.380. Therefore, the Covid-19 pandemic has caused the population gap between rich and poor to widen. In facing the today and future's economic situation, the actualization of the values of Pancasila is an important solution to improve the Indonesian economy, especially the people's economic efforts so that the goals of people's welfare for all Indonesian people can be properly optimized.

**Keywords** : Pancasila, Indonesia Economics, Economic Inequality.

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya, setiap kehidupan khususnya dalam bisnis dan ekonomi, setiap orang memerlukan landasan untuk berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Salah satu landasan penting yang menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia selain agama yaitu Pancasila. Namun pada era modern ini, masih banyak warga Indonesia mungkin hanya menganggap kehadiran pancasila sebagai hari peringatan atau dasar negara yang diwariskan leluhur sejak kemerdekaan Indonesia. Faktanya tidak semua rakyat Indonesia memahami betul makna pancasila dalam kehidupannya dan belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila terutama dalam kehidupan bisnis dan ekonomi. Perekonomian memiliki peran penting dalam kelangsungan warga dan dalam menjalani setiap kehidupan ekonomi tanpa disadari nilai-nilai Pancasila turut serta mendampingi warga Indonesia dalam bertindak dan mengambil setiap keputusan. Baik sebagai pedoman, pandangan hidup, dan sistem pembentuk etika dalam mempertahankan kestabilan perekonomian atau bahkan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga Indonesia.

Sebuah usaha ekonomi, untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dalam menjalankan bisnisnya pastinya setiap perusahaan harus menyesuaikan dengan keinginan pasar, terkadang beberapa orang cenderung menghalalkan segala cara baik melanggar regulasi pemerintahan, korupsi, merugikan masyarakat lain dengan cara negatif lainnya untuk mendapatkan uang. Globalisasi dan situasi seperti pandemi menjadi pemicu warga Indonesia untuk

lebih berpikir kritis dan dapat menimbulkan pandangan yang cukup berbeda atau melenceng dari nilai-nilai Pancasila, Globalisasi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena tidak semua orang mampu beradaptasi dengan situasi ekonomi yang dialami. Krisis ekonomi di Indonesia juga mendorong pemerintahan untuk mengubah beberapa kebijakan ekonomi.

Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara mengandung nilai-nilai yang secara tidak langsung akan memberi dampak positif dalam kegiatan perekonomian. Maka dari itu, jika Pancasila ditekankan dan diaktualisasi dengan baik, tujuan setiap warga dapat menjadi lebih mudah dicapai dan akibatnya, kesejahteraan setiap usaha perekonomian rakyat baik usaha kecil, menengah hingga perusahaan besar dapat sejahtera dan perekonomian Indonesia dapat berkembang.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam menulis jurnal ini yaitu dengan metode analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan berasal dari data Badan Pusat Statistik dan data kualitatif diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen publik, kajian pustaka, observasi, dan dokumen resmi yang terkalit lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pancasila

Pancasila secara harfiah (Etimologis) “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta dari India (bahasa kasta Brahmana), yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu Panca yang berarti lima, dan Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta Pancasila memiliki arti “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.” (Kaelan, 2004:21) Pancasila kemudian menjadi dasar negara, tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, alenia ke empat, yang berbunyi :

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

### Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan Pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan Gini Ration. Dari segi penyebabnya, Todaro dalam Suyana Utama (2009) mengatakan, kesenjangan distribusi pendapatan di negara berkembang disebabkan oleh

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita,
- b. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,
- c. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang

### Etika Bisnis

Etika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang standar moral yang kita anut. Standar moral adalah standar yang melibatkan penilaian kebaikan dan keburukan, preferensi orang banyak dibandingkan untuk kepentingan sendiri, tidak dikembangkan oleh pemerintah atau orang berkuasa, dirasakan bersifat universal, diasosiasikan dengan emosi khusus (seperti rasa bersalah) dan perbendaharaan kata seperti obligasi, hak, dan keadilan (Velasquez, 2018).

Ilmu etika bisnis secara khusus berbicara mengenai penerapan etika dalam lingkungan bisnis. Etika bisnis adalah ilmu yang mempelajari standar moral sebagai panduan dalam aktivasi bisnis.

### 1. Latar Belakang Kesenjangan Ekonomi

Ketidak merataan ekonomi atau biasa disebut kesenjangan ekonomi menjadi salah satu masalah yang masih susah teratasi di negara Indonesia ini. Masih terdapat banyak celah antara golongan kaya dan miskin di Indonesia. Kesenjangan ini sangat terlihat seperti dalam dunia pendidikan di masa pandemi, beberapa siswa-siswi terutama di daerah pedesaan sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online melalui teknologi digital. Tidak semua penduduk di pedesaan mampu mengikuti kegiatan seperti ini salah satunya karena keterbatasan ekonomi. Sehingga banyak terjadi selama masa pandemi, siswa-siswi memutuskan untuk menghentikan pendidikannya.

Ketimpangan ini juga dapat kami lihat baik melalui pendapatan dan juga melalui analisis IPM. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan analisa pencapaian rata-rata suatu negara

dalam tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan penghasilan individu untuk mendukung kehidupan yang layak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, rasio Gini pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa dari tahun 2015 hingga 2020 terjadi perbaikan pemerataan ekonomi penduduk Indonesia. Namun, pada bulan Maret 2020 hingga September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia yang diukur oleh rasio gini naik sebesar 0.01.

Kesenjangan Ekonomi yang terjadi di setiap negara dapat disebabkan oleh banyak hal. Dalam kesenjangan ekonomi pada tahun 2011, distribusi nilai PDRB antar provinsi menunjukkan tingkat kesenjangan yang tinggi dan tingkat perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera jauh lebih maju dibandingkan terhadap wilayah luar Jawa-Bali dan Sumatera. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sektor ekonomi antar provinsi dan yang terutama yaitu adanya kesenjangan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan suatu input dalam proses produksi yang dapat memberikan peningkatan produktivitas marginal pada output. Infrastruktur ini dapat mendorong kegiatan ekonomi dan melancarkan proses produksi dan mobilitas manusia, jasa, barang sehingga mempermudah setiap daerah untuk menciptakan pendapatan yang maksimal.

Sedangkan kesenjangan ekonomi pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan semua warga melakukan kegiatan ekonominya melalui teknologi atau

secara virtual. Tentu, hal ini menimbulkan perubahan kebiasaan para warga khususnya dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Banyak pengurangan ketenaga kerjaan yang kemudian menyebabkan pengangguran, sulitnya mendapatkan pekerjaan hingga mengharuskan setiap penduduk untuk lebih berhemat karena melemahnya perekonomian Indonesia. Hal ini tentu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kesenjangan ekonomi. Yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin menjadi semakin miskin.

Kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat menjadi masalah serius jika tidak segera di atasi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Indonesia, kelompok dengan pendapatan rendah akan sulit atau bahkan tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan dapat menimbulkan krisis ekonomi. Kesenjangan pendapatan di suatu daerah juga dapat menimbulkan kriminalitas, peningkatan migrasi dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju, hingga krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Adanya anggapan bahwa pemerintah sebagai aparat negara tidak mampu mengatasi permasalahan dan tentu hal ini dapat menjadi ancaman baru dalam keutuhan negara NKRI. Maka dari itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi ketimpangan yang ada baik pemerintah maupun dari warga negara Indonesia sendiri harus bekerja bersama mengatasi, memperbaiki ketertinggalan perekonomian untuk daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya dalam menjalankan perekonomiannya.

## 1. Pemerintah dalam Menghadapi Isu Ekonomi Indonesia

Pemerintah memegang peran penting dalam memperbaiki permasalahan ekonomi terutama dalam menghadapi kesenjangan ekonomi di beberapa daerah. Setiap pemerintah memiliki caranya masing-masing dalam memperbaiki masalah ekonomi. Sebagai contoh, selama pemerintah Jokowi, Indeks Gini telah berhasil menurun. Penurunan indeks Gini ini ternyata turut disertai dengan meningkatnya pembangunan rakyat Indonesia dalam segi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Data terbaru menunjukkan bahwa IPM Indonesia meningkat cukup pesat yaitu selama 2010-2021 meningkat sebesar 0,76 persen. Peningkatan IPM 2021 tidak hanya terjadi pada satu dimensi saja namun semua dimensi dimulai dari kesehatan, pengetahuan, standar hidup layak.

Setiap pemerintahan memiliki program kerja yang berbeda setiap masa jabatannya dan setiap calon pemimpin atau presiden pasti menginginkan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. Salah satu program kerja nyata yang sampai sekarang warga Indonesia rasakan melalui pemerintahan Presiden Jokowi dimana pembangunan daerah dilakukan secara berkala dan konsisten. Salah satunya yaitu pembangunan jalan tol yang menghubungkan daerah-daerah di Indonesia dan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya dilakukan di daerah Jawa saja, melainkan seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya konektivitas atau penghubung antar daerah, tentu mobilitas manusia dan barang dapat lebih dipermudah dan membuat biaya bahan pokok semakin terjangkau. Selain itu, Presiden Jokowi

juga turut aktif memberikan bantuan berupa uang tunai kepada siswa-siswa keluarga kurang mampu usia 6-21 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Hingga Oktober 2017, presiden Jokowi telah berhasil mendistribusikan 17,9 juta kart Indonesia Pintar dari target 19,7 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam berkontribusi secara nyata untuk pemeratakan kesenjangan ekonomi.

Selain melalui program kerja, pemerintahan juga mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi melalui pembentukan ataupun perubahan kebijakan. Pada masa pemerintahan SBY, kemiskinan diatasi secara progresif dengan meningkatkan anggaran kemiskinan yang tadinya dari 5.7% kemudian meningkat menjadi 7% pada tahun 2014. Presiden SBY juga secara berkala memberikan bantuan nyata melalui pendidikan, kesehatan dan kredit mikro. Setelah pemerintahan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, beberapa program ini tetap dilanjutkan namun Jokowi juga memiliki strategi yang lebih nyata dan dirasakan oleh rakyat Indonesia secara langsung.

Memang, setiap aparat pemerintah sudah melakukan tindakan nyata dalam menangani kesenjangan ekonomi. Namun kenyataannya, kesenjangan ekonomi masih tetap ada dan hal ini sulit untuk dihindari. Maka dari itu, pemerintah juga harus memberikan keadilan bukan hanya bagi daerah tertentu saja melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia secara konsisten. Tidak hanya pemerintah pusat saja yang beroperasi, namun semua aparat pemerintah terutama pemerintah daerah memiliki peran besar untuk meningkatkan pengembangan dan

pertumbuhan ekonomi terutama melalui kontribusi kepada usaha ekonomi rakyat. Misalnya dalam memberikan pinjaman dengan bunga rendah yang kini disebut Kredit Usaha Rakyat. Pinjaman ini diberikan kepada UMKM untuk mendapatkan modal atau suntikan dana untuk usahanya dengan bunga yang cukup rendah. Selain itu, pemerintah juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di beberapa daerah dan juga di pedesaan mengingat situasi pada masa pandemi yang membuat para rakyat sulit untuk bekerja.

## **2. Peran Pancasila Sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan Bisnis dan Ekonomi**

Jika pemerintah memegang peran penting dalam kehidupan perekonomian, masyarakat juga berperan dalam kehidupan ekonomi. Dalam menjalankan kelangsungan hidup, setiap warga memerlukan landasan sebagai satu hal untuk membuat keputusan dan menuangkan ide-ide terutama dalam berbisnis ataupun bekerja. Landasan yang kemudian dijadikan pandangan hidup dalam bertindak ini secara tidak langsung dibentuk oleh nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara yang dirumuskan para leluhur hingga menjadi warisan dan asset utama bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia.

Pancasila menjadi sistem etika dapat menjadi petunjuk atau pegangan untuk bertindak. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di

Indonesia. Didalam Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kelima sila ini yang akan membentuk perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya. Dalam berbisnis, diharapkan setiap rakyat Indonesia berpartisipasi dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila karena Pancasila menjadi sebuah standar moral bagi warga Indonesia dalam bertindak.

“KeTuhanan Yang Maha Esa”, itulah bunyi dari sila pertama Pancasila yang mana dapat dimaknai bahwa hubungan manusia dengan Tuhan menjadi aspek terpenting dalam kehidupan bernegara. Ajaran agama juga turut membentuk perilaku dan etika yang tentunya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam berbisnis dan menjalankan usaha. Ketaatan pada nilai agama yang dianutnya memberi kepercayaan tersendiri akan seseorang untuk dapat menjalankan kehidupannya dengan benar. Ketika seseorang telah memilih kepercayaannya, maka setiap orang tersebut memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak ada ajaran agama yang memberi dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Maka dari itu, dengan adanya ajaran agama, kehidupan ekonomi akan turut senantiasa terjaga.

Sebagai pemimpin dalam suatu usaha, menjaga hubungan baik terhadap karyawan maupun kepada pelanggan merupakan aspek penting dalam ekonomi. Pemimpin usaha harus memperhatikan dan memastikan karyawannya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Seperti halnya

dengan makna Pancasila ke dua, “Kemanusiaan yang adil beradab”. Dimana setiap pelaku ekonomi harus menjadikan manusia lebih manusiawi. Menjaga dan meningkatkan kualitas kemanusiaan di setiap hubungan dengan orang lain. Hal ini perlu ditekankan terutama untuk para pekerja atau karyawan untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan nyaman dan tentram. Dalam konteks ini, kesenjangan antar rakyat tidak lagi menjadi masalah karena setiap orang akan saling menghargai satu dengan yang lainnya,

Sila persatuan juga turut mendampingi pelaku ekonomi dalam berbisnis maupun bekerja. Solidaritas dan nilai kebersamaan akan selalu menjadi bagian dalam bekerja. Saling peduli dan tolong menolong adalah poin penting baik didalam usaha maupun di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang sangat sulit untuk mendapatkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Sila persatuan dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi situasi pandemi maupun ketimpangan yang ada di Indonesia. Tidak harus melalui subsidi dana, membantu orang lain dalam memfasilitasi pekerjaan juga bermanfaat bagi masyarakat untuk bekerja. Sebagai pelajar Indonesia, mencintai produk lokal dapat membantu meningkatkan usaha UMKM di lingkungan sekitar. Memilih untuk menggunakan produk lokal dibandingkan produk luar negeri menjadi nilai kebanggaan tersendiri dalam menyikapi cinta tanah air serta kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sila ke-empat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” turut menjadi solusi dalam situasi dan keadaan dalam bekerja. Walaupun pemimpin usaha menjadi penentu dalam setiap keputusan, namun dibalik adanya keputusan perlu adanya diskusi dimana setiap karyawan dapat secara bebas berpendapat dan mengemukakan ide-ide dalam menghadapi masalah ekonomi dalam usahanya. Hal ini sangat diperlukan karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan tentu hal ini menjadi keunggulan suatu perusahaan agar dapat melihat suatu situasi dari segi dan pandangan yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya, musyawarah menjadi sangat penting untuk di aktualisasi dalam kehidupan ekonomi.

Dalam usaha meningkatkan ekonomi rakyat, sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia” menjadi aspek penting terutama untuk menanggulangi kesenjangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya sila kelima, setiap pelaku ekonomi diharapkan untuk dapat peduli atas nasib orang, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Memang, dalam berbisnis setiap orang didorong untuk mencari keuntungan maksimal dengan biaya atau modal yang minim. Namun, keadilan menjadi suatu acuan agar prinsip saling menguntungkan dapat berjalan dalam berbisnis. Keadilan mendorong dan mencegah terjadinya keuntungan hanya pada satu pihak saja. Memberikan harga yang sebenarnya kepada pelanggan, memberikan fasilitas yang sebaik-

baiknya dan yang terpenting, memperlakukan semua pelaku bisnis baik hubungan internal dalam perusahaan maupun eksternal hubungan diluar usaha secara sama rata tanpa membeda-bedakan dan tanpa memandang sebelah rakyat kecil maupun yang lebih tinggi.

Kelima sila tersebut sangat memberi pengaruh besar dalam menjalankan suatu perekonomian. Pancasila sebagai jiwa setiap warga Indonesia tidak hanya diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa namun dalam kehidupan sehari-hari yaitu melalui bekerja, dan menjalankan usaha ekonomi menjadi wadah setiap masyarakat Indonesia untuk mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan kebersamaan yaitu kesejahteraan rakyat yang adil, dengan bahasa ekonomi yaitu usaha yang saling menguntungkan. Tidak hanya menguntungkan satu pihak, namun semua pihak yang menjadi pelaku ekonomi.

### **3. Solusi Meningkatkan Usaha Ekonomi Rakyat**

Pancasila menjadi solusi utama dalam meningkatkan usaha ekonomi rakyat dan menjadi pondasi penting dalam menjalankan perekonomian dalam menghadapi situasi dan masalah di negara Indonesia. Akhir-akhir ini masih banyak kasus korupsi yang sering terjadi terutama dalam ekonomi Indonesia. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin, dan orang-orang yang cenderung menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Melihat isu-isu atau permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi warga Indonesia, peran dan kedudukan

Pancasila sebagai sistem etika dalam berbisnis patut dipertanyakan. Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman dan petunjuk dalam bertindak belum diaktualisasi oleh pelaku ekonomi di Indonesia.

Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dimana semua kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi tidak semata-mata dilakukan sebagai usaha individu melainkan dengan usaha bersama dalam asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi ini diharapkan tidak hanya menguntungkan beberapa pihak pemilik modal saja, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Tujuan sistem ekonomi Pancasila ini adalah mewujudkan kemakmuran masyarakat secara maksimal dan merata. Dalam kondisi di era modern ini, masyarakat dihadapi banyak tantangan dengan adanya sistem globalisasi dan masa pandemi Covid-19. Setiap ekonomi rakyat didorong untuk dapat beradaptasi, memiliki motivasi yang kuat, dan kreativitas dalam mengembangkan usahanya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat Indonesia harus mampu mengimplementasikan nilai Pancasila secara konkrit dalam kehidupan ekonominya. Pemerintah juga dituntut untuk beradaptasi dengan membuat kebijakan baru, program kerja untuk membantu ekonomi rakyat dan mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia seperti kesenjangan ekonomi, dalam menjalankan peran pemerintah, pemerintahan harus selalu dilandasi oleh

nilai Pancasila demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yaitu memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

## SIMPULAN

Di era modern ini, rakyat Indonesia dihadapi dengan situasi dan tantangan baru yang membuat masyarakat lebih sulit untuk menjalankan kegiatan perekonomiannya. Dalam menghadapi masalah ekonomi di Indonesia, perekonomian Indonesia harus didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila dan usaha kebersamaan dengan asas kekeluargaan dan persatuan. Pancasila menjadi solusi setiap permasalahan ekonomi terutama dalam menghadapi kesenjangan ekonomi yang menjadi masalah utama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Baswir, Revrisond (1995), *Kesenjangan Ekonomi, Konglomerasi, dan Korupsi*. Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar internasional! Daiam Rangka 50 Tahun Indonesia Merdeka dan Lustrum keVFE-UGM, Yogyakarta

Kaderi, M.Pd.I, DRS.H.M. Alwi (2015), *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : ANTASARI PRESS

Velasquez, M. G. (2018). *Business Ethics Concepts and Cases* (8<sup>th</sup> ed.), California :Pearson

Mulyo, Drs. Sumedi Andono. *Analisis Kesenjangan Antarwilayah 2013*. Sumatera : Deputy Bidang Pengembangan Regional dan

Pancasila sebagai sistem etika berbisnis dan ekonomi dapat meningkatkan pemerataan, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila juga harus menjadi landasan pemerintah dalam mengembangkan paradigma baru melalui kebijakan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia harus berpartisipasi menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbisnis dan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan persatuan. Sehingga, bersama-sama pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat menciptakan perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dan sejahtera.

Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nurwardani, Paristiyanti & Munir, Misnal, dkk.(2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ohmae, Kenichi. 2002. *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas*, Yogyakarta: Qalam

Badan Pusat Statistik. Data Rasio Gini. Diakses 15 Juni 2022. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49->

persen--dibandingkan-capaian-  
tahun-sebelumnya--71-94-.html

Kata Data. Indeks Pembangunan Manusia.  
Diakses 15 Juni 2022. diakses dari  
<https://databoks.katadata.co.id/data>

publish/2022/01/17/bps-  
ketimpangan-pengeluaran-  
penduduk-indonesia-menurun